

**EVALUASI PROGRAM *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (*UHC*)
DALAM MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU LAYANAN
KESEHATAN DI PUSKESMAS LUBUK JAMBI**

SKRIPSI

*Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara*



Oleh:

**RANDI SETIAWAN
NPM. 210411007**

**PROGRAM STUDI ADMINISTASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EVALUASI PROGRAM *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)* DALAM MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU LAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LUBUK JAMBI
NAMA : RANDI SETIAWAN
NPM : 210411007
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan disahkan oleh panitia Penguji Ujian Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 30
Bulan : September
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA



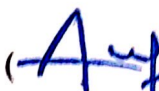
EMILIA EMHARRIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

SEKRETARIS



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

1. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
2. SARJAN M, S.Sos., M.Si
3. DESRIADI, S.Sos., M.Si

(Pembimbing I) ()
(Anggota Penguji I) ()
(Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“EVALUASI PROGRAM *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (*UHC*) DALAM MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU LAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LUBUK JAMBI”** yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah dipergunakan untuk mendapat gelar keserjanaan di lingkungan Universita Islam Kuantan Singingi maupun perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 2025
Yang membuat pernyataan



RANDI SETIAWAN
NPM. 210411007

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (UHC) DALAM MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU LAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LUBUK JAMBI

Oleh

**Randi Setiawan
NPM. 210411007**

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Lubuk Jambi dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program *Universal Health Coverage* (UHC) dalam meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi program UHC, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menilai dampaknya terhadap kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi terkait pelaksanaan program UHC. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UHC di Puskesmas Lubuk Jambi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Namun demikian, program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, serta kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan. Secara umum, UHC dinilai telah membantu masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala biaya, meskipun masih terdapat aspek yang harus diperbaiki agar tujuan peningkatan mutu layanan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci : *Universal Healt Coverage*, Evaluasi

ABSTRACT

EVALUATION OF THE UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) PROGRAM IN IMPROVING ACCESS AND QUALITY OF HEALTH SERVICES AT PUSKESMAS LUBUK JAMBI

By

**Randi Setiawan
NPM. 210411007**

This study was conducted at Puskesmas Lubuk Jambi to evaluate the implementation of the Universal Health Coverage (UHC) program in improving access to and the quality of health services. Specifically, this research aims to understand the implementation process of UHC, identify the challenges faced, and assess its impact on the accessibility and quality of health services for the community. This research employed a qualitative approach with a survey method. Data were collected through observation, in-depth interviews with key informants, and document studies related to the implementation of the UHC program. The data were analyzed using thematic analysis techniques, including data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of UHC at Puskesmas Lubuk Jambi has had a positive impact on improving community access to health services, especially for disadvantaged groups. However, several challenges remain, such as limited facilities and infrastructure, unequal distribution of health personnel, and the need to enhance service quality. Overall, the UHC program has been beneficial in enabling the community to access health services without financial barriers, although further improvements are required to achieve optimal service quality.

Keywords: Universal Health Coverage (UHC), Health Service Evaluation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, atas berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“EVALUASI PROGRAM *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (UHC) DALAM MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU LAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LUBUK JAMBI”**.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad shalallahu alih wassalam, karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahaya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga dalam penulisan Skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Hingga pada akhirnya penulis sadari semua akan indah pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.PdI, M.PdI** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhandi, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

3. Bapak **Emilia Emharis, S.Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak **Alsar Andri S.Sos., MSi** selaku Pembimbing I yang telah membantu dan mengarahkan penulisan selama perkuliahan berlangsung dan penyelesaian Skripsi.
5. Bapak **Sahri Muharram S.Sos., MSi** selaku Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulisan selama perkuliahan berlangsung dan penyelesaian Skripsi.
6. Bapak **Sarjan M S.Sos.,M.Si** selaku penasehat Akademik
7. Seluruh staff pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi..
8. Teman-teman seperjuangan di kelas Administrasi Negara angkatan 2021, sukses untuk kita semua.

Butuh lembar yang luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua, hanya ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Teluk Kuantan, November 2024

Randi Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Teori Administrasi Negara	7
2.1.2 Kebijakan Publik	13
2.1.3 Teori Evaluasi.....	17
2.1.4 Teori Implementasi.....	21
2.1.5 <i>Teori Universal Health Coverage (UHC)</i>	25
2.2 Kerangka Pemikiran.....	27
2.3 Hipotesis Kerja.....	28
2.4 Definisi Operasional.....	28
2.4.1 Output	28
2.4.2 Proses.....	29
2.4.3 Input.....	29
2.4.4 Outcam.....	29
2.5 Operasional Variabel.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Informan.....	32

3.3 Sumber Data.....	32
3.3.1 Data Primer.....	32
3.3.2 Data Sekunder.....	33
3.4 Fokus Penelitian.....	33
3.5 Lokasi Penelitian.....	33
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6.1 Pengamatan (observasi)	34
3.6.2 Wawancara.....	34
3.6.3 Dokumentasi	34
3.6.4 Triangulasi	35
3.7 Metode Analisis Data.....	35
3.7.1 Pengumpulan Data (<i>data collection</i>).....	35
3.7.2 Reduksi Data (<i>data reduction</i>).....	35
3.7.3 Penyajian Data (<i>data display</i>).....	36
3.7.4 Penarikan Kesimpulan (<i>conclusion drawing/verification</i>).....	36
3.8 Jadwal Penelitian.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
4.1 Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi	38
4.2 Gambaran Umum Puskesmas Lubuk Jambi	38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Identitas Responden	45
5.2 Hasil Penelitian Evaluasi Program <i>Universal Health Coverage</i> (<i>Uhc</i>) Dalam Meningkatkan Akses Dan Mutu Layanan Kesehatan Di Puskesmas Lubuk Jambi	46
5.2.1 Indikator Input.....	46
5.2.2 Indikator Proses.....	51
5.2.3 Indikator Output.....	56
5.2.4 Indikator Outcome	61
5.3 Hasil dan Pembahasan Evaluasi Program <i>Universal Health Coverage</i> (<i>Uhc</i>) Dalam Meningkatkan Akses Dan Mutu Layanan Kesehatan Di Puskesmas Lubuk Jambi.....	66

BAB VI PENUTUP	69
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Operasional Variabel.....	25
Tabel 3.1 Informan.....	27
Tabel 3.8 Jadwal Penelitian.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	23
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hasil judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mensyaratkan bahwa setiap daerah di Indonesia berhak mengembangkan suatu sistem jaminan sosial. Dalam perkembangannya hingga saat ini cukup banyak daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengembangkan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), mulai yang sekedar hanya berupa hibah atau bantuan sosial, sampai pada yang sudah dikelola secara profesional oleh badan penyelenggara jaminan sosial daerah. Serta Munculnya otonomi daerah memiliki pengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan atas penyelenggaraan kesehatan. Melalui regulasi tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan di wilayahnya (Nisnoni 2020:3).

Jaminan Kesehatan adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat. Tujuan adanya jaminan kesehatan adalah sebagai upaya menjaga diri demi kondisi kesehatan. Karena Jaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disingkat JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Muncullah Kebijakan Program Universal Health Coverage

(selanjutnya disingkat UHC) yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara merata. Program ini mencakup pemberian layanan kesehatan yang tidak hanya bersifat promotif, preventif, kuratif, tetapi juga rehabilitatif dan paliatif, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada diskriminasi berdasarkan status ekonomi.

Dengan adanya tantangan dalam mencapainya, pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan bahwa cakupan kepesertaan UHC dapat merata hingga tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk melaksanakan UHC di wilayahnya, salah satunya di Kabupaten Kuantan Singingi melalui program yang dikenal dengan nama UHC Kabupaten Kuantan Singingi. Program ini bertujuan agar warga Kabupaten Kuantan Singingi, terutama yang tidak mampu, dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis tanpa terkendala biaya atau status kepesertaan BPJS.

Sistem kesehatan saat ini secara global diarahkan ke dalam program UHC atau disebut Cakupan/Jaminan Kesehatan Universal. Hal ini bertujuan agar terjadi penguatan sistem kesehatan secara komprehensif dan koheren di mana semua individu secara global dapat merasakan keadilan kesehatan tanpa takut keterbatasan finansial. Karena mencapai derajat sehat yang adil dan menyeluruh itu harus dilakukan dengan cara pembebasan finansial melalui akses yang mudah yaitu jaminan kesehatan dan asuransi kesehatan.

UHC berarti semua orang dalam suatu masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif) yang mereka

butuhkan, berkualitas tinggi, tanpa takut bahwa biaya untuk membayar layanan ini pada saat digunakan akan mendorong mereka ke dalam kesulitan keuangan. Sederhananya UHC mencakup 3 hal yaitu kesetaraan dalam akses ke layanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan dan penggunaan layanan tidak membuat orang berisiko mengalami kerugian finansial.

Program UHC secara global dicanangkan kedalam Sustainable Development Goals (selanjutnya disingkat SDGs) lewat tujuan ke 3.8.1 (UHC esensial) dengan target pada tahun 2030 setengah dari populasi manusia (7,3 miliar) dapat mengakses kesehatannya, 800 juta orang di seluruh dunia yang 10 persen dari anggaran rumah tangganya tidak dihabiskan hanya pembiayaan perawatan kesehatan dan 100 juta orang tidak lagi terdorong ke dalam jurang kemiskinan. Oleh sebab itu, leburnya UHC kedalam SDGs memberikan pedoman kepada 183 negara agar terlepas dari masalah tersebut dengan menerapkan UHC sesuai 14 indikator yang telah ditetapkan secara bersama-sama (Rara 2021:2).

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menginisiasi sebuah program yang diberikan sebagai bentuk jaminan kesehatan bagi warga masyarakatnya, dengan tujuan agar warga masyarakat khususnya di Kecamatan Kuantan Mudik bisa mendapatkan layanan berobat gratis. UHC atau jaminan kesehatan untuk warga merupakan program Bupati Kuantan Singingi bekerja sama dengan Badan Jaminan Sosial Kesehatan (selanjutnya disingkat BPJS). Program ini adalah sistem pelayanan jaminan kesehatan bagi warga Kuansing secara menyeluruh di mana biaya

sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan dana yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan Program UHC yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tujuan agar semua warga di Kabupaten Kuantan Singingi tidak perlu khawatir untuk mendapatkan akses pengobatan dengan alasan tidak memiliki biaya, tidak mengikuti kepesertaan jaminan kesehatan, menunggak bayar iuran BPJS maupun sebagainya karena melalui program ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mensubsidi melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menyukseskan program ini.

Puskesmas Lubuk Jambi merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan UHC di wilayahnya. Sebagai pusat layanan kesehatan bagi masyarakat, Puskesmas memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun, terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas program UHC di Puskesmas ini, namun dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh Puskesmas Lubuk Jambi dalam mendukung program UHC. Beberapa masalah yang muncul antara lain adalah keterbatasan sarana dan prasarana, distribusi tenaga kesehatan yang belum optimal, kualitas layanan yang masih perlu ditingkatkan, serta kendala dalam menjaga keberlanjutan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap layanan kesehatan puskesmas juga memengaruhi tingkat kepercayaan dan partisipasi mereka dalam program UHC.

Evaluasi terhadap program UHC di Puskesmas Lubuk Jambi menjadi penting untuk menilai sejauh mana program UHC yang dijalankan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar kualitas layanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karena itu penulis ingin memberikan judul penelitian **“EVALUASI PROGRAM *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (UHC) DALAM MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU LAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LUBUK JAMBI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Evaluasi Program *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (UHC) di Puskesmas Lubuk Jambi”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi Program *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (UHC) di Puskesmas Lubuk Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Sebagai bahan kajian ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Negara. Selain itu juga bermanfaat bagi lembaga-lembaga kajian lainnya yang juga mengkaji masalah *Universal Health Coverage*.

1.4.2 Aspek Akademis

Dapat menjadi sarana implementasi ilmu perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara dan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan konteks *Universal Health Coverage*.

1.4.2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada penentu kebijakan daerah mengenai aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Program guna meningkatkan akses dan mutu layanan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, ilim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Di tingkat bawah adalah fungsi pengawas. (Ummah 2019:4).

Ilmu administrasi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang paling muda, lahir pada akhir abad ke-19. Henri Fayol (1841-1925) adalah seorang sarjana Prancis, yang pertama melihat adanya prinsip-prinsip *universal* yang berlaku bagi administrasi yang mana pun dan dimana pun. (Ummah 2019:4).

Henri Fayol membawakan pengertian “administrasi (*Peradministration*) yang umum berlaku di daratan Eropa (Eropa Kontinental), dikalangan bangsa Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Belgia, Belanda dan sebagainya. Adapun di Inggris dan

negara negara bekas jajahan Inggris, termasuk Amerika Serikat, pengertian semacam itu tidak ada. Yang mirip-mirip adalah “Manajemen” Oleh karena itu, buka Henri Fayol “*Administration Industrielle at “ Industrial and general management”*”, suatu terjemahan yang jelas bagi orang Inggris, tetapi membingungkan bagi kita di Indonesia yang menganut pandangan Eropa Kontinental sebagai bekas jajahan Belanda. (Ummah 2019:5).

Ilmu administarsi Negara adalah Ilmu Pengetahuan (cabang ilmu administrasi) yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern struktur-struktur dan proses- proses yang terdapat di bagian yang sangat penting daripada sistem dan aparatur pemerintahan. Secara singkat, disebut administrasi Negara. Dalam bahasa Inggris Amerika disebut *public administration*, namun lebih tepat disebut *state administration*, dan dalam Bahasa disebut *openbaarr bestuur*.

Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sebagai suatu konsep, administrasi adalah *Universal Application*. Administrasi ada bersamaan dengan munculnya umat manusia dan akan terus dipakai selama umat manusia itu masih hidup. Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai dengan sifat usahanya, namun secara substantial ia adalah sama.

Unsur-unsur administrasi pasti ada, sekalipun berada di masyarakat primitive. akan bertambah canggih Bersama dengan bertambah maju dan

kompleksnya masyarakat. Administrasi muncul karena kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Manusia menyadari akan nilai kerja sama dari suatu kenyataan bahwa hanya dengan melalui kegiatan kolektif lah ia dapat memperoleh sesuatu yang tak dapat ia capai seorang diri.

Kerjasama menurut adanya pembagian kerja di antara anggotanya. Pembagian kerja ini diperlukan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, seperti ketidakmampuan individu untuk berada di dua tempat ada waktu yang bersamaan, ketidakmampuan untuk menguasai berbagai macam pengetahuan dan skill, serta ketidakmampuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas secara sempurna. Kesemuanya itu disebabkan oleh perbedaan skill, sifat, dan kapasitas individu.

Kemajuan teknologi telah memaksa secara imperative diadakannya pembagian kerja dan secara substantial telah meredusir pentingnya kemampuan individual di dalam organisasi. Metode pembagian kerja antar anggota ini didasarkan atas perbedaan kemampuannya yang disebabkan oleh faktor keturunan dan factor lingkungan. Hasilnya adalah penggunaan kemampuan yang sangat efisien serta akan mengarah kepada spesialisasi keahlian.

Administrasi merupakan alat dan bukan merupakan tujuan. Dengan demikian, maka tujuan akhir administrasi tidak berbeda dengan tujuan akhir organisasi. Administrasi diciptakan untuk melayani organisasi dan keberadaannya tidak untuk keperluan lain. Agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik, administrasi dituntut untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka menengah.

Ini meliputi keteraturan aktivitas yang dilaksanakan, penyedia dan penggunaan sumber manusiawi dan material secara kebijaksana, pengurangan pemborosan dan inefisiensi, ekonomis di dalam operasi, kesejahteraan pegawai, kepuasan langganan, pemecahan masalah secara cepat dan lainlain. Tidak ada organisasi yang sukses dalam mencapai tujuannya tanpa dukungan administrasi yang efektif.

Dalam konteks yang agak luas, pencapaian tujuan ekonomi, sosial, politik, militer atau keagamaan dari suatu organisasi sangat tergantung pada administrasi yang efisien. Usaha kelompok bertanggung jawab untuk memajukan masyarakat dan sebaliknya kemajuan masyarakat ditunjang oleh administrasi yang berkelanjutan dan tertib. Administrasi yang efisien secara nyata memberikan andil yang sangat besar bagi suksesnya suatu organisasi dan akhirnya akan mengarah pada kemakmuran masyarakat. (Ekowanti dan Tamrin 2022:7-8).

Administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (*public administration consist...all those operations having for the purpose the fulfilment and enforcement of public policy*) lebih lanjut, Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategy policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal nya sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan).

Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Atmosudirdjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan

pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut: Pertama, sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan). Kedua, administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yaitu sebagai kegiatan pemerintah operasional. Ketiga, administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Dari pengertian tersebut sesungguhnya pemaparan mengenai administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi, yaitu: Pertama, administrasi negara sebagai organisasi dan kedua, administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik yang artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara *dwigend recht* (hukum yang memaksa). (Agus Hiplunudin 2021:22).

Administrasi negara merupakan sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas – tugasnya tersebut.

Dalam dunia administrasi, unsur-unsur kunci yang sering diangkat oleh para ahli meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Perencanaan berperan sebagai landasan dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, sementara pengorganisasian memastikan bahwa sumber daya dan struktur organisasi disusun dengan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pengarahan melibatkan pemberian

instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Pengawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan. Sementara itu, pengambilan keputusan menjadi inti dari setiap tahapan administrasi, di mana keputusan strategis diambil berdasarkan analisis mendalam untuk memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Secara keseluruhan, kelima unsur ini bekerja secara sinergis untuk memastikan operasional organisasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. (Sahya 2016:1).

Menurut Suwarno (dalam Afifudin 2015:3) Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan pencatatan secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bila diperlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yang bersifat teknis, ketatausahaan (*clerial work*) jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerial work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi.

Menurut Atmosudirjo (dalam Ngusmanto 2015:15) administrasi adalah sesuatu yang terdapat dalam sesuatu organisasi tersebut, sehingga organisasi itu tidak dapat berkembang. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Suminta (dalam Pasolong 2016:3) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-

keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi apapun bentuk organisasinya baik organisasi publik maupun organisasi bisnis.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Papilaya, 2020:5) kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat (kelompok) yang kurang beruntung. Dari definisi Chandler dan Plano, kebijakan publik masuk dalam lapis pemaknaan kebijakan publik sebagai intervensi dari pemerintah. Optimalisasi kebijakan public kemudian ada pada ranah sumber daya berupa sistem dalam masyarakatnya, sehingga kebijakan publik akan menghasilkan output yang berfungsi mensinergikan kebijakan tersebut.

Menurut Udin (2017:9) kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika publik aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

Menurut Syahrudin (2018:3) kebijakan publik merupakan output utama dari pemerintah, karena itu fokus utama administrasi publik adalah kebijakan publik. Administrasi publik, dipandang sebagai proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,

mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan keputusan dalam kebijakan publik.

Secara realita kebijakan publik dalam konteks tersebut diidentikkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tanggung jawab negara atau pemerintah terhadap warga negara. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai suatu kebijakan publik. Pandangan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk bersikap atau melakukan tindakan sebagai respon terhadap suatu keadaan.

Menurut Farid Wajdi dan M. Hum Andryan, 2022:4) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Carl Federick (dalam Leo Agustino, 2014:87) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana dapat hambatan hambatan (kesulitan kesulitan) dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melihatkan perilaku yang memibki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun keboakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikeriakan daripada apo yang dawulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Konsepsi kebijakan publik tersebut mengandung unsur berikut:

1. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
2. Melakukan sesuatu itu adalah mengatasi permasalahan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan orang banyak.

Dengan mempelajari kebijakan publik maka dapat memahami isi kebijakan publik atau yang dibuat pemerintah, menilai dampak dari kekuatan lingkungan, menganalisis akibat dari pengaturan berbagai kelembagaan, proses politik, meneliti dan mengevaluasi dampak kebijakan publik terhadap sistem sosial politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya, sekaligus terhadap negara.

Menurut Didin Muhafidin dan Yadiman (2020:29) kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan publik mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi isu-isu yang berdampak luas pada masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan publik. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Maulana Dan Rosmayanti (2020:7) kebijakan publik merupakan suatu hal yang diputuskan oleh pemerintah, baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan publik sangatlah penting karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Menurut Friedrich (dalam Nur dan Guntur, 2019:13) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Menurut rahmawati Gulo dan Mendrofa (2024:2) kebijakan atau kajian kebijakandapat pula merujuk pada proses pembuatankeputusan-keputusanpenting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan

2.1.3. Teori /Konsep Evaluasi

Secara umum, istilah evaluasi dipadankan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (Handoyo 2019:35).

Setiap evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi seorang analis untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Ciri-ciri evaluasi kebijakan dimaksud di antaranya. 1. tujuannya menemukan hal-hal strategis, untuk meningkatkan kinerja kebijakan. 2. evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan target kebijakan. 3. prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. 4. dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan dan kebencian. 5. mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan. (Handoyo 2019:40).

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi

kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Menurut Anwar (dalam Taali 2024:52) proses evaluasi dianggap sebagai suatu penilaian yang memberikan gambaran terhadap sejauh mana keberhasilan suatu tindakan dapat dicapai.

Menurut Situmorang (dalam Permatasari 2020:3) evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicitacitakan. Sehingga, tidak

heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Kegiatan evaluasi terdiri dari *spesification, measurement*, analisis dan rekomendasi.

Tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut James Anderson seperti yang dikutip oleh Situmorang, terdiri dari tiga tipe yaitu :

- a. Evaluasi merupakan kegiatan fungsional sehingga dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan.
- b. Evaluasi berfokus pada kinerja sebuah kebijakan, sehingga memilih kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
- c. Evaluasi kebijakan sistematis yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan seputar kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, biaya-biaya yang digunakan dan keuntungan yang diraih, dan penerima keuntungan.

Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dari sebuah kebijakan, bagaimana pelaksanaannya, dan dampak seperti apa yang didapatkan. Terdapat tiga unsur yang harus dilakukan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- a. Menjelaskan output kebijakan yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut.
- b. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan sebuah kebijakan dalam memperbaiki masalah sosial.
- c. Evaluasi berkaitan dengan setiap konsekuensi kebijakan dalam bentuk reaksi akan tindakan pemerintah.

Proses evaluasi kebijakan memiliki masalah-masalah karena proses ini mengikut sertakan banyak kepentingan, sehingga kegagalan ketika menentukan kriteria dapat menghambat proses ini. Menurut Anderson, masalah-masalah evaluasi kebijakan terdiri dari:

- a. Adanya ketidak pastian akan tujuan kebijakan. Ketidak pastian atau ketidak jelasan ini berasal dari proses penetapan kebijakan.
- b. Kausalitas.
- c. Penyebaran dampak dari kebijakan, di mana dampak tersebut merupakan bagian dari keadaan-keadaan kelompok di luar kelompok sasaran utama.
- d. Sulitnya mendapatkan data terutama statistik dan informasi yang relevan dalam pelaksanaan evaluasi.
- e. Resistensi pejabat, dimana evaluator harus berpikir objektif dalam mendapatkan pengetahuan.
- f. Evaluasi dapat mengurangi dampak, sehingga tidak menerima banyak perhatian atau dengan kata lain diabaikan.

Menurut Rina Febriana (2019:7) evaluasi (*evaluation*) adalah penilaian yang sistematis tentang manfaat atau kegunaan suatu. Dalam melakukan evaluasi terdapat judgment untuk menentukan nilai suatu program yang sedikit banyak mengandung unsur subjektif. Evaluasi memerlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian yang memiliki banyak dimensi, seperti kemampuan, kreativitas, sikap, minat, keterampilan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, dalam kegiatan evaluasi, alat ukur yang digunakan juga bervariasi bergantung pada jenis data yang ingin diperoleh. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat bertahap, maksudnya kegiatan dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi.

Tujuan dari evaluasi adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan memberikan keputusan terhadap suatu program yang dievaluasi, apakah program tersebut harus diperbaiki, diteruskan, atau bahkan dihentikan. Selanjutnya, kegunaan dari hasil evaluasi ini adalah sebagai acuan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Untuk lebih lanjut, berikut perbedaan lebih jelas di antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi.

2.1.4. Teori /Konsep Implementasi

Menurut Patton dan Sawicki (dalam Cristianingsih 2020:7) implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya

implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Implementasi kebijakan publik tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan.

Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahapan-tahapan. (Role et al 2021:5)

implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana- sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Sementara itu (Role et al 2021:7) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan

agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Implementasi menurut teori Jones (dalam Mulyadi 2015:45) *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement*

or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Grindle (dalam Mulyadi 2015:47) “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan menurut Horn (dalam Tahir 2014:55) “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut Gordon (dalam Mulyadi 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Widodo (dalam Syahida 2014:10) “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Sedangkan menurut Wahyu (dalam Mulyadi 2015:50) studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Menurut Gunn dan Hoogwood (dalam Tahir 2014:55) “mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”.

Menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Syahida 2014:8-9) mengemukakan bahwa: “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.

Menurut Syauckani dkk (dalam Pratama 2015:229) “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

2.1.5. Teori /Konsep *Universal Health Coverage* (UHC)

Universal health Coverage (UHC) merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya terjangkau. UHC adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. (Setyowati 2022:3).

Universal health coverage menuntut upaya pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat, akan tetapi harus dipahami bahwa *Universal health coverage* bukan merupakan jaminan kesehatan tak terbatas atau pengobatan gratis, akan tetapi juga mencakup pengelolaan semua komponen sistem kesehatan, juga menyangkut peningkatan mutu pelayanan, peningkatan cakupan pada saat sumber daya sudah semakin baik.

Kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan akses terhadap pelayanan kesehatan juga bagian dari hak asasi setiap manusia. *Universal Health Coverage* (UHC) menjadi bagian tak terpisahkan dalam mendorong pemenuhan hak asasi tersebut. UHC sendiri dalam definisinya berkaitan dengan sebuah sistem yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, dimanapun dan kapanpun tanpa mengalami kendala finansial. (Saputro and Fathiyah 2022:3).

16 jenis layanan kesehatan dasar, dalam 4 kategori

1. KIA

Kb (Keluarga Berencana) ANC(Imunisasi, Pneumonia.

2. Penyakit Menular

TBC, HIV, Malaria, Sanitasi.

3. PTM

Tekanan darah, Glukosa darah, Kanker serviks, Tembakau.

4. Kapasitas dan Akses

Akses RS, Nakes, Farmasi, IHR.

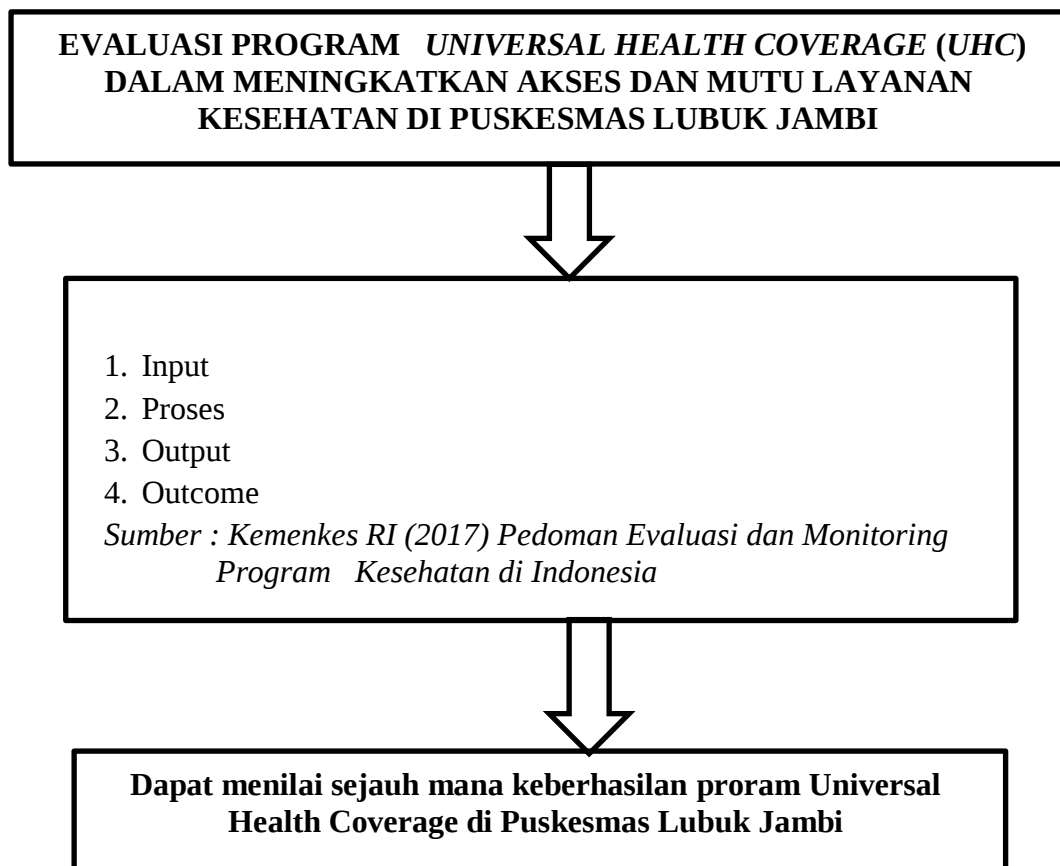
Pada hakekatnya, UHC adalah diperolehnya pelayanan kesehatan yang baik secara *de facto* tanpa rasa takut akan kesulitan keuangan. Ini tidak dapat dicapai kecuali jika layanan kesehatan dan sistem perlindungan risiko keuangan dapat diakses, terjangkau, dan dapat diterima. Tanpa akses universal, UHC menjadi tujuan yang tidak dapat dicapai. Syarat pemenuhan capaian UHC bagi layanan kesehatan antara lain: (Pradana et al 2022:3).

1. Dapat diakses secara fisik, Persyaratan bahwa layanan dapat diakses secara fisik dipenuhi jika tersedia, berkualitas baik dan terletak dekat dengan orang-orang. Kesiapan layanan dikatakan ada ketika input yang dibutuhkan untuk menghasilkan layanan (misalnya gedung, peralatan, tenaga kesehatan, produk kesehatan, teknologi) juga tersedia dan berkualitas baik.
2. Terjangkau secara finansial, Keterjangkauan keuangan dapat ditingkatkan dengan mengurangi pembayaran langsung dan tidak langsung melalui pembayaran di muka dan pengumpulan asuransi atau melalui stimulus sisi permintaan seperti bantuan tunai bersyarat dan voucher.
3. Dapat diterima oleh pasien, Aksesibilitas sosial dan budaya dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa petugas kesehatan dan sistem kesehatan secara lebih umum memperlakukan semua pasien dan keluarganya dengan bermartabat dan hormat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian.

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Program *Universal Health Coverage (Uhc)* Dalam Meningkatkan Akses Dan Mutu Layanan Kesehatan Di Puskesmas Lubuk Jambi.



2.3 Hipotesis Kerja

Program UHC belum bisa di akses sepenuhnya oleh masyarakat karena masih banyak yang belum mengetahui.

2.4 Definisi Operasional

2.4.1 Input

Input adalah segala sumber daya yang digunakan dalam sebuah program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya ini bisa berupa tenaga manusia, dana, peralatan, bahan baku, teknologi, hingga kebijakan yang mendukung. Misalnya, dalam program kesehatan, input dapat berupa dokter dan

tenaga medis, anggaran program, obat-obatan, dan infrastruktur rumah sakit. Input yang baik akan menjadi dasar yang kuat bagi keberhasilan suatu program. Kemenkes RI (2017:4).

2.4.2 Proses

Proses adalah tahapan atau aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan program dengan menggunakan input yang tersedia. Proses mencerminkan bagaimana program diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemenkes RI (2017:4).

2.4.3 Output

Output adalah hasil langsung yang diperoleh dari pelaksanaan suatu program. Output biasanya dapat diukur secara kuantitatif dan menunjukkan sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan rencana. Kemenkes RI (2017:4).

2.4.4 Outcome

Outcome adalah dampak atau perubahan yang terjadi akibat program tersebut dalam jangka pendek maupun panjang. Outcome menunjukkan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya secara lebih luas. Kemenkes RI (2017:5).

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Program *Universal Health Coverage (Uhc)* Dalam Meningkatkan Akses Dan Mutu Layanan Kesehatan Di Puskesmas Lubuk Jambi

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Evaluasi	Evaluasi program universal health coverage (UHC) dalam meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di puskesmas lubuk jambi	Input	Kesesuain Sumber daya	Ordinal
			Kualitas Sumber daya	
		Proses	Kendala dalam Pelaksanaan	Ordinal
		Output	Kualitas Hasil	Ordinal
			Dampak Awal	
		Outcome	Pencapaian Tujuan	Ordinal
			Perubahan yang terjadi	

Sumber : Modifikasi Peneliti 2025

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif.

Menurut Fraenkel dan Wallen (dalam Maidiana 2021:2) survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menayakannya melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi.

Menurut Sugiyono (2017:7) penelitian *survey* adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Menurut Harahap (2020:22) penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro. Terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia (*behavior*) dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka. Karena apa yang kelihatan menggejala tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran dan keinginan sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola fikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif teradap suatu gejala (fenomena) sosial.

3.2 Informan

Menurut Sugiyono (2017:218). Dalam konteks penelitian, informan adalah individu yang memberikan informasi penting terkait objek atau fenomena yang diteliti. Sugiyono menjelaskan bahwa pemilihan informan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam penelitian kualitatif.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk lebih jelasnya informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1 : Informan Penelitian Evaluasi Program *Universal Health Coverage (Uhc)* Dalam Meningkatkan Akses Dan Mutu Layanan Kesehatan Di Puskesmas Lubuk Jambi

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase %
		Key Informan	Informan	
1	Kepala Puskesmas	1	1	25 %
2	Tenaga Kesehatan		1	25 %
4	Masyarakat		3	50%
	Jumlah	1	5	100%

Sumber : Modifikasi Peneliti 2025

3.3 Sumber data

Menurut Sugiyono (2015:156) mengemukakan penelitian data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder

3.3.1. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang

memiliki up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. (V. Wiratna Sujarweni 2014:32).

3.3.2. Data Sekunder

Menurut (Dicky 2021:6) Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen perusahaan.

.Menurut (V. Wiratna Sujarweni 2014:33) Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen.

3.4 Fokus Penelitian

Tidak ada penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk evaluasi program *universal health coverage* (*uhc*) dalam meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di puskesmas lubuk jambi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Puskesmas Lubuk Jambi, Jl. Sudirman No. 48, Lubuk Jambi, Kec. Kuantan Mudik.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1. Pengamatan (*observasi*)

Dalam menggunakan metode Observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi karena dilakukan dengan adanya pengamat yang terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang diteliti. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan terhadap dua objek, yaitu objek utama dan objek pendukung. (V. Wiratna Sujarweni 2014:20).

3.6.2. Wawancara

Menurut (V. Wiratna Sujarweni 2014:22) wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam.

3.6.3. Dokumentasi

Menurut (V. Wiratna Sujarweni 2014:22) teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk

dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal dan sebagainya.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Sugiyono (2017:274) *triangulasi* adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data untuk meningkatkan validitas dan keandalan informasi yang diperoleh. Triangulasi bertujuan untuk mengecek keabsahan data dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber atau metode, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:244) metode analisis data adalah proses sistematis yang dilakukan setelah pengumpulan data untuk mengorganisasikan, menyusun, dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Tahapan dalam menganalisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif, yaitu:

3.7.1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Yaitu pengumpulan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pendalamannya data pada proses pengumpulan data berikutnya.

3.7.2 Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2017:249) reduksi data adalah proses yang dilakukan untuk menyaring dan merangkum data yang telah dikumpulkan selama penelitian.

Proses ini bertujuan untuk mengorganisir data yang besar dan kompleks menjadi informasi yang lebih terfokus dan mudah dipahami. Dalam reduksi data, peneliti memilih hal-hal yang penting, mengelompokkan informasi, serta mencari tema dan pola dari data yang ada. Sugiyono menjelaskan bahwa reduksi data berlangsung secara terus-menerus sepanjang proses penelitian, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi data mana yang relevan dan mana yang tidak diperlukan. Dengan demikian, reduksi data membantu peneliti untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3.7.3 Penyajian Data (*Display Data*)

Menurut Sugiyono (2019:249) penyajian data adalah langkah dalam analisis data yang dilakukan setelah proses reduksi data. Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2017:245) penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data yang dilakukan setelah proses penyajian data. Dalam konteks penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan ini dapat mencakup temuan-temuan baru yang muncul selama penelitian dan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid. Sugiyono menjelaskan bahwa kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh data yang kuat. Namun, jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang konsisten dan valid, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan keandalan hasil penelitian.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Program Universal Health Coverage (UHC) di Puskesmas Lubuk Jambi telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif. Ketersediaan tenaga kesehatan, sarana prasarana, serta koordinasi antar instansi mendukung kelancaran program. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan lebih mudah mengakses layanan kesehatan secara setara dan tanpa biaya.

6.2 Saran

Puskesmas Lubuk Jambi diharapkan terus meningkatkan pelayanan, terutama dengan memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait alur pendaftaran UHC, agar program ini semakin optimal dan merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifudin. 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2014. *Politik Pemerintahan*. Jakarta: Alfabeta.
- Ekowanti, M. R. L., & Tamrin, M. H. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*.
- Farid Wajdi, dan M. Hum Andryan. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.
- Gulo, Rahmawati, dan Mendrofa. 2024. *Kebijakan Publik: Konsep dan Implementasi*. Medan: Pustaka Mandiri.
- Handoyo, Eko, Fakultas Ilmu, Sosial Universitas, Negeri Semarang, Eko Handoyo, and Widya Karya. *Buku Kebijakan Publik*cetak.
- Harahap, 2020. *Penelitian kualitatif*. Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing
- Hiplunudin, Agus. 2021. *Etika Administrasi Negara*. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
- Maulana, dan Rosmayanti. 2020. *Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulana, dan Rosmayanti. 2020. *Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhafidin, Didin, dan Yadiman. 2020. *Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Papilaya, D. 2020. *Kebijakan Publik dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Permatasari, I. A. (2020). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*.

Rina Febriana, 2019. *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sahya, A. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. CV. Pustaka Setia.

Sugiyono, 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahrudin. 2018. *Administrasi Publik dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Kencana.

Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. 2024. *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan*. Jambi: Sonpedia Publishing.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Udin. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Surabaya: Penerbit Cendekia.

Wiratna Sujarweni, V. 2014. *Metodologi Penelitian*. PT. Rineka Cipta.

B. Jurnal

Anggriawan, Bryan. 2013. "Analisis Perencanaan Kreatif 8-11 Show Metro TV Sebagai Program Acara Variety Show Berita Pertama Di Indonesia." *Digilib.Esaunggul*, 66–83.

Arsyam, Muhammad, and M. Yusuf Tahir. 2021. "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2 (1): 37–47.

Didin Muhafidin, dan Yadiman. 2020. *Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Frederick, Carl. Dalam Leo Agustino. 2014. *Politik Pemerintahan*. Jakarta: Alfabeta.

Nisoni, Delila. 2020. "Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Program UHC (Universal Health Coverage) Di Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* 1 (1): 1–15.

- Pradana, Anung Ahadi, Casman Casman, Rohayati Rohayati, and Musaddad Kamal. 2022. "Program Universal Health Coverage (UHC) Di Indonesia." *Jurnal Endurance* 7 (2): 462–73.
- Rara, Abd. Rahman. 2021. "Evaluasi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di RSKDIA Siti Fatimah Makassar: Study Explanatory." *Angewandte Chemie International Edition* 6(11), 951–952., 1–97.
- Saputro, Cipto Rizqi Agung, and Fenny Fathiyah. 2022. "Universal Health Coverage: Internalisasi Norma Di Indonesia." *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)* 2 (2): 204–16.
- Setyowati, Retno Kus. 2022. "Sistem Jaminan Kesehatan Yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan." *Justice Voice* 1 (1): 1–9.
- Syahida. 2014. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Pinang dalam Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat." *Jurnal Sosial* 3 (2).